

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah krisis identitas kebangsaan pada diri peserta didik berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, menjadi persoalan serius. Indikasi adanya krisis identitas kebangsaan tersebut ditunjukkan dengan perilaku peserta didik yang bangga dengan produk luar negeri, tidak serius dalam mengikuti hari-hari besar nasional, kurang peduli dengan lingkungan sekitar, berkembang sikap egois, mau menang sendiri, cenderung lebih menyukai budaya asing dibandingkan budaya sendiri, dan pola perilaku lainnya yang cenderung kebarabaran.

Gejala tersebut semakin kentara ketika bangsa Indonesia pasca gerakan reformasi 1998 menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Krisis identitas kebangsaan menjadi persoalan serius saat semakin menguatnya politik sektarian atau politik aliran yang dikembangkan berbagai organisasi massa maupun organisasi politik. Pada kondisi seperti itu, pendidikan karakter kebangsaan di sekolah menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan, dalam rangka mempertahankan integrasi bangsa di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Rais (1998, 23 Agustus, hlm. 6) saat itu mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini kesadaran bangsa Indonesia pada proses yang menjurus ke arah disintegrasi nasional merupakan suatu fenomena yang merata. Hal senada diungkapkan Subarso (1998, 29 September, hlm. 6) dengan melukiskan eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan sedang diuji. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, kesenjangan antardaerah, kerusuhan di Irian Jaya, tuntutan agar Timtim menentukan nasib sendiri, dan terbongkarnya killing fields di Aceh. Ancaman disintegrasi seakan sudah ada di depan mata.

Kondisi tersebut menurut, Thohari (1998, 19 September, hlm. 6) tidak lepas dari gambaran bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, bahkan yang paling pluralis di dunia; suatu bangsa dengan ratusan etnis, ratusan bahasa dan dialek, puluhan agama dan kepercayaan (masing-masing dengan segala variannya), dan aneka ragam kebudayaan serta adat kebiasaan. Puluhan ideologi atau aliran politik juga mengharu biru jagad perpolitikan negeri ini, dimana jejak-jejak konflik yang ditimbulkannya - yang laten dan manifest - masih suka menyembul ke permukaan sampai kini. Dalam kajian lain, Thohari (2000, hlm. 132) mengungkapkan bahwa kesemua aspek dan segi pluralisme yang multikompleks itu telah merajut sebuah mozaik keindonesiaan yang begitu indah dan mempesona, meski rawan akan konflik.

Pada awal abad ke-21, menurut Supardan (2015, hlm. 254), Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam hal masalah nasionalisme. Persoalan konflik horizontal dan vertikal yang terjadi mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsa. Krisis multidimensi (1997-2000) telah membawa masalah serius dalam hal integrasi bangsa. Konflik di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sambas, Sampit, Timor Timur, Maluku Poso, sampai dengan Papua, telah membuka wajah Indonesia saat itu. Dalam fenomena tersebut semakin menguatkan bahwa “krisis multidimensi Indonesia sebagai hal yang telah membuka topeng sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi. Ia dengan pustus asa dan emosional penuh sinis serta sindiran terhadap Indonesia sebagai negeri yang serba seolah-olah, *a heap of delusions*, tidak ada lagi sebenarnya apa yang disebut nasionalisme, heroisme, keadilan, persatuan, kejujuran maupun kebanggaan“.

Kondisi serba seolah-olah tersebut diulas pula Simbolon (dalam Supardan, 2015) dengan mengatakan bahwa:

Pendeknya, lembaga-lembaga lama bertahan kendati tanpa wibawa. Indonesia membangun dengan fundamental ekonomi yang seolah-olah kuat; dengan politik yang seolah-olah stabil; dengan kesadaran seolah-

olah bersatu; dengan pemerintahan seolah-olah bersih dan kompeten; dengan ABRI yang seolah-olah satria; dengan ahli hukum seolah-olah adil; dengan pengusaha yang seolah-olah *captains of industry*;... Semua tampak salah, ibarat gigi palsu yang memang lebih kemilau daripada gigi asli,... mirip kebohongan di atas kebohongan (hlm. 254)

Ketahanan integritas bangsa Indonesia saat itu, menurut Supardan (2015, hlm. 256) sedang diuji kehandalan karena kelalaiannya. Pemerintah Orde Lama, Orde Baru telah keliru merasionalkan persatuan yang bersifat mistis itu menjadi suatu nasionalisme tanpa mewujudkan ke-mistis-an persatuan tersebut secara empiris. Maksudnya, pemerintah tidak memberi kesempatan bahwa masing-masing kelompok etnik untuk mengekspresikan keleluasaannya dalam persatuan bangsa ini. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang beragam secara suku bangsa, agama, ras dan antargolongan, sangat rentan dengan ancaman disintegrasi. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan berkembangnya sikap kedaerahan dan sektarianisme.

Guna memahami kondisi pendidikan karakter kebangsaan saat ini, perlu dibahas ulang perkembangan pendidikan kebangsaan Indonesia secara historis. Hal tersebut didasarkan pada hakikat sejarah sebagai sebuah perubahan dan kontinuitas yang bermakna bahwa peristiwa di masa lampau berdampak pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu, mengkaji masalah pendidikan karakter kebangsaan saat ini, tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, budaya dan historis yang melahirkan nilai-nilai kebangsaan.

Perkembangan pendidikan kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi masyarakat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Situasi masyarakat di tanah Jawa pada abad ke-19, secara umum terdiri dari beberapa kelas sosial. Pembagian kelas sosial masyarakat tersebut dibentuk secara sepihak oleh Penguasa Kolonial Belanda berdasarkan asal usul dan ras. Kelas kesatu ditempati oleh masyarakat keturunan Eropa berkulit putih (Belanda, Inggris, Portugis). Kelas Kedua ditempati oleh masyarakat Timur Asing (Cina, Arab,

India, Pakistan), dan Kelas Ketiga ditempati kelompok Bumiputera (Raja, Bangsawan, dan Rakyat Jelata. Di dalam kelompok bumiputera berlaku sistem feodalisme yang menentukan posisi seseorang berdasarkan kepemilikan tanah dan jumlah pekerja yang menggarap tanah tersebut.

Selain berkembangnya sistem pelapisan sosial kolonial tersebut, kajian mendalam terkait masyarakat Jawa yang dilakukan Geertz (1960, hlm. 5) di sebuah desa (Mojokuto) Kediri, Jawa Timur, menemukan tiga varian sikap keberagaman umat Islam di Jawa (Indonesia), yaitu kelompok Abangan, Priyayi dan Santri. Kelompok *Abangan* adalah kelompok mayoritas yang kehidupannya sangat tergantung pada *ekonomi*. Kelompok Priyayi adalah kelompok pegawai pemerintahan yang hidupnya sudah terjamin karena mendapat gaji dari pemerintah colonial Belanda. Kelompok *Santri* yakni kelompok yang hidupnya ada di sekitar Kyai atau ulama. Menurut Geertz, yang paling dikhawatirkan adalah apabila kelompok abangan membantu kelompok santri menentang Belanda, maka yang akan terjadi Belanda akan menjadi repot. Itulah sebabnya Geertz memberi saran kepada Belanda untuk mengupayakan agar kelompok abangan tidak membantu (sejalan) dengan kelompok santri, dengan cara membuat suatu persaingan tidak sehat antara kelompok santri dengan kelompok priyayi. Dalam pandangan Geertz kelompok priyayi pasti akan menjadi pemenang karena ada dukungan dari Belanda, juga akan memperoleh dukungan dari kelompok abangan karena kelompok priyayi dapat memberi janji-janji ekonomi kepada kelompok abangan yang memang mereka butuhkan.

Perubahan pun melanda Indonesia abad ke-19 ditandai oleh praktik kapitalisme dan liberalisme modern di negeri jajahan Hindia Belanda. Kartodirdjo (1990) melukiskan situasi perkembangan kapitalisme dan liberalisme modern saat itu, berikut ini:

“Kurang lebih tahun 1870 Belanda memasuki periode Kapitalisme modern. Hasil revolusi industri selama masa dua puluh tahun sebelumnya terwujud di dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan dan komunikasi

yang modern. Volume perdagangan dengan pesatnya sedang perkembangan modal terjadi secara besar-besaran. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik “pintu terbuka” di Hindia Belanda dengan perkembangan perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasarnya di negeri negeri asing daripada di Negeri Belanda sendiri. Sebagian besar perkebunan yang didirikan sesudah tahun 1870 merupakan objek-objek penanaman modal. Ekspor modal ke Hindia Belanda sangat menanjak sejak tahun 1890. Dapat ditambahkan di sini, bahwa modal Belanda diekspor juga ke negeri-negeri di luar tanah jajahannya” (hlm. 22)

Kondisi seperti yang dijelaskan di atas menggambarkan terjadinya politik liberalisme. Hal yang demikian memberikan dampak pada sistem politik di Negeri Belanda yang pada gilirannya berdampak pula pada perkembangan politik dan ekonomi kolonial di negeri jajahan Hindia Belanda. Praktik-praktik politik liberalisme tersebut, bagi kaum liberalis dan kapitalis Belanda di satu pihak telah mendorong terjadinya pergantian “kekuasaan” kolonial di Hindia Belanda. Sedangkan di pihak lain telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat jajahan Belanda di Hindia Belanda. Akibatnya, kebijakan politik ekonomi liberalisme Belanda mendapat reaksi dan kritikan dari berbagai kelompok humanis.

Salah satu kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di negeri jajahannya ini, menurut Kartodirdjo (1990, hlm. 33) ialah *kaum etis*, nama yang digunakan untuk menyebut politik kolonial yang baru, *politik etis*. Salah seorang juru bicara dari golongan ini ialah Van Deventer yang menulis artikel berjudul *Een Eereschuld* di media *De Gids*. Tuntutan agar perbaikan kesejahteraan terhadap pribumi makin kuat karena adanya kemerosotan kesejahteraan penduduk pribumi makin parah dan pandangan ini berasal dari kalangan perdagangan. Perkembangan politik di negeri jajahannya, *Nederlandsch-Indie*, pada akhirnya mendorong dimulainya politik kesejahteraan baru, dan itu resmi tercantum di dalam Pidato Ratu

Belanda, yang merupakan pertanda dimulainya zaman baru dalam pemerintahan kolonial, tahun 1903.

Dampak dari sistem politik etis diantaranya ialah memunculkan kaum cendikawan sebagai pelopor pergerakan nasional. Benih-benih kemunculan kaum cendikiawan ini, menurut Gonggong (2010, hlm, 13) telah ada sejak pemerintah kolonial Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan khusus, untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang lebih terampil-profesional di dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. Salah satu diantara pendidikan khusus tersebut adalah STOVIA, yang juga disebut sebagai sekolah dokter Jawa. Pembentukan organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, menunjukkan bahwa alumni-alumni STOVIA telah memberikan peran sangat strategis, tampil sebagai “pemula” untuk merubah nasib bangsanya, dari warga pribumi yang “berbangsa” banyak menjadi bangsa yang satu-bersatu.

Sejalan dengan keterangan di atas, pemikiran Maarif (2009) tentang pengaruh pendidikan Barat abad ke-19 terhadap pergerakan kebangsaan penting untuk diungkapkan. Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kemudian apa yang dikenal dengan era Pergerakan Nasional sebenarnya adalah buah langsung dari sistem pendidikan Belanda yang membuka hati dan mata penduduk Nusantara. Ternyata hasil pendidikan Barat ini bagi sistem kolonial tak ubahnya seperti memelihara anak harimau, setelah besar tuannya dilawan dan bahkan diterkam. Dari rahim pendidikan Barat inilah munculnya tokoh-tokoh pergerakan yang secara berangsur bergerak menuju ke kemerdekaan tanah air dengan memakai senjata organisasi modern yang diilhami oleh sistem pendidikan Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung penjajahan juga telah “berjasa” bagi Nusantara yang kemudian dikenal dengan nama bangsa dan negara Indonesia” (hlm, 89)

Kutipan di atas, menyebutkan hasil langsung dari sistem pendidikan Belanda yang membuka hati dan mata penduduk Nusantara. Hal itu, merupakan kenyataan bahwa pendidikan yang semula dikenalkan sebagai upaya “pemenuhan kebutuhan” administrasi pemerintah dan untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan swasta, seperti yang diinginkan Politik Etis, ternyata berdampak pada keberlangsungan proses menuju dan menjadi bangsa yang satu-bersatu.

Dalam waktu bersamaan dengan perkembangan barat di nusantara, berkembang pula Gerakan Modern Islam, yang dalam catatan Rikclef (2007, hlm. 256), dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Beberapa orang muslim Timur Tengah sudah berkesimpulan yang sama pada abad ke-19, Jamal ad-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammad Rasyid Rida (1865-1935), dan Muhammad Abduh (1849-1904) menciptakan suatu gerakan pembaharuan yang disebut modernisasi atau Islam Modern dengan pusatnya di Kairo. Modernisasi mempunyai tujuan ganda, pertama gerakan ini ingin membebaskan diri dari keempat mashab abad pertengahan dan kembali pada sumber-sumber Islam yang asli yaitu Al Quran dan Al Hadist atau Sunnah. Tujuan kedua, memanfaatkan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan modern dan memadukannya dengan ajaran Islam murni untuk mengangkat peradaban Islam keluar dari zaman kebodohan, ketakhyulan, dan kemunduran.

Perkembangan Gerakan Modern Islam di Indonesia saat itu, mendapat hambatan dari Pemerintah Hindia Belanda yang berusaha membatasi perjalanan haji hingga tahun 1902. Karena itu, banyak muslim Indonesia yang berangkat haji melalui Singapura, di mana pihak Inggris tidak melarang mereka. Maka, Singapura saat itu menjadi pintu gerbang arus modernisasi Islam ke Indonesia. Selanjutnya orang-orang Minangkabau, memainkan peranan penting di dalam gerakan pembaruan Islam tersebut. Tokoh-tokohnya antara lain Syaikh Tahir Jalaluddin (Muhammad Tahir bin Jalaluddin al-Zahari, 1869-1957), Syaikh Ahmad Khatib (lahir 1855), Syaikh Muhammad Djamil Djambek dan Syaikh Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah, 1879-1945). Gerakan modern di Minangkabau ditandai dengan berdirinya Sekolah Thawalib dan terbitnya surat kabar dua-mingguan bernama *al-Munir* (Penerangan).

Dalam perkembangan selanjutnya, Gerakan Modern Islam berpengaruh ke Jawa ditandai dengan berdirinya organisasi Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran organisasi pergerakan bercorak Islam tersebut, menurut Van Niel (1984, hlm. 116) tidak lepas pula dari situasi keagamaan di Nusantara yang ditandai politik peng-Kristenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara khusus, tentang pergerakan Muhammadiyah membendung peng-Kristenan, Van Niel (1984) memberikan catatan bahwa yang menjadi pimpinan penyerang dari pihak oposisi Islam terhadap politik peng-Kristenan pemerintah adalah organisasi pembaharu Islam bernama Muhammadiyah yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Ulasan lebih lanjut Van Niel mengungkapkan bahwa:

Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta dengan tujuan untuk menghadapi kegiatan misi di daerah-daerah tertentu ini dan juga mengembangkan cita-cita pembaharuan Islam. Dahlan ternyata seorang guru yang sangat meyakinkan dan organisasinya mulai maju perlahan-lahan tetapi mantap. Program praktisnya mencontoh cara misi dan ditujukan kepada kerja sosial. Sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, klinik-klinik dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang benar-benar diilhami cara Barat telah didirikan oleh Muhammadiyah. Keanggotaan berdasar perseorangan tanpa ada tekanan ketakutan pada tahyul seperti sering terdapat di dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Organisasi ini dijalankan menurut cara Barat dan segera memperoleh status legal dari pemerintah-hal ini di mata sebagian orang Indonesia sama dengan pengakuan secara resmi, meskipun di dalam jurisprudensi Barat ia hanya menunjukkan kedudukan khusus di dalam hukum” (hlm, 118-119).

Dari gambaran historis di atas, organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi yang bersifat nasional, dengan corak pergerakan yang universal tidak terbatas bergerak dalam bidang keagamaan semata, akan tetapi bergerak pula pada bidang lainnya yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemudian, bagaimana karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan nasional yang tetap konsisten dengan misi ke-Islam-annya? Hal itu yang menjadi bagian kajian latar belakang studi ini dan uraian singkatnya dapat disimak berikut ini.

Dalam Matan dan Cita-Cita Hidupan Muhammadiyah, pada Pedoman Sikap Hidup Muhammadiyah hasil Keputusan Tanwir Ponorogo (1969, hlm. 9) dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Sebagai suatu gerakan Islam dan Dakwah, Muhammadiyah pun menjalankan fungsi dan misinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Hal itu tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah tentang Rumusan matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah pada bagian Kelompok Ketiga (1969, hlm. 14) yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia, ialah angka 5. Isi dari fungsi dan misi angka 5 tersebut berbunyi: 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah SWT: *“Baladatul Thayyibatun Wa Robbun Ghafur”*

Terkait dengan penjabaran Fungsi Dan Misi Muhammadiyah (1969, hlm. 20-21) secara rinci dapat dilihat dalam Matan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, berikut ini:

9.1. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni seperti tersebut diatas, Muhammadiyah menyadari kewajibannya: berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia, untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Republik Indonesia, sehingga merupakan masyarakat dan Negara yang adil dan makmur, sejahtera bahagia, materil dan sprituil yang diridhai Allah SWT.

9.2. Mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia sampai dewasa ini, semua yang ingin dilaksanakan dan dicapai oleh Muhammadiyah dari pada keyakinan dan cita-cita hidupnya, bukanlah hal yang baru, dan hakekatnya adalah sesuatu yang wajar.

9.3. Sedang pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat Negara Republik Indonesia, Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya, sebagai jalan satusatunya. Lebih lanjut mengenai soal ini dapat diketahui dan difahami dalam "Khittah Perjuangan Muhammadiyah"

Perjalanan sejarah Muhammadiyah sebagai Gerakan Nasional Modern telah membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Nashir (2008:36) menggambarkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya Muhammadiyah berhasil mengantarkan kaum muslim Indonesia menjalankan perubahan dari masyarakat tradisional menjadi lebih modern, agraris menjadi industri, pedesaan menjadi perkotaan, feodalistik menjadi lebih egaliter.

Dalam kajian lainnya Nashir (2008) pun mencatat bahwa Muhammadiyah senantiasa peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban (hlm. 37).

Uraian Nashir tersebut telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial-keagamaan yang juga peduli dengan kehidupan politik dan kenegaraan. Lebih dalam lagi, Nashir (2011, hlm. 41) mengatakan bahwa "sebagai organisasi masyarakat atau *civil society* Muhammadiyah telah menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan sosial". Dan, sebagai organisasi pergerakan peran Muhammadiyah sangat luar biasa. Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan menegakkan Negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, serta

memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan ideologi dunia. (Nashir, 2011, hlm. 53-54)

Pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan modern pun diungkapkan Banyuni (2010, hlm. 56), dengan menguraikan analisis historisnya bahwa Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat muslim di tanah air menyosong kehidupan modern/urban. Ia merupakan kekuatan progresif tapi tidak radikal dalam tindakan, walaupun pemikiran-pemikirannya mungkin dianggap revolusioner untuk makna saat itu.

Sementara itu, Muhadjir Effendy (2009), dalam makalahnya yang disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, menyatakan bahwa:

Dengan mengacu pada rumusan hasil tanwir Muhammadiyah sebelumnya, maka esensi pendidikan kebangsaan adalah inheren dengan dakwah Muhammadiyah. Pendidikan kebangsaan adalah bagian dari representasi, implementasi dan aksi nyata dari dakwah kultural yang dirumuskan pada Tanwir Muhammadiyah di Bali (2002) yang lalu. Visi kebangsaan yang bertitik tolak dari kesadaran akan keanekaragaman budaya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah juga diadopsi dengan baik oleh sementara anak-anak muda Muhammadiyah. (hlm. 7-8)

Lebih lanjut, Effendy (2009:8) mengungkapkan bahwa “dalam konteks ini, menurut hemat kita perlu ditegaskan bahwa dakwah kultural harus disertai dengan kesadaran akan realitas masyarakat multikultural sebagai sasaran dakwah Muhammadiyah. untuk membentuk manusia yang multi-kultur (sebagai ciri kewarganegaraan “warganegara multikultur” di abad 21 yang sarat dengan globalisasi). Ciri warganegara multikultural di abad 21 sebagai pencerminan masyarakat multikultural yang hendak dibangun Indonesia adalah masyarakat yang semakin meneguhkan semangat bhinneka tunggal ika sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia”. Lantas, tantangan seperti apa yang muncul pada abad ke-21 terkait dengan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme Indonesia?

Pengaruh krisis multidemensi terhadap rasa kebangsaan atau nasionalisme seperti diungkapkan di atas, telah mengindikasikan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme semu, nasionalisme yang penuh dengan kepentingan politik sesaat, dan nasionalisme yang tidak mengakar pada sendi-sendi keragaman budaya. Semestinya kemajemukan yang ada di Indonesia menjadi perekat yang kuat, karena hakikatnya kemajemukan tersebut berasal dari rumpun budaya yang sama.

Fenomena lain yang mengemuka di tengah derasnya gejala degradasi dan dekadensi nasionalisme di Indonesia ialah berkembangnya gerakan transnasional yang membawa dogma-dogma agama. Dihubungkan dengan keberadaan organisasi Muhammadiyah, krisis multidimensi, dekadensi nasionalisme, dan munculnya gerakan transnasional, menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi Muhammadiyah. Menurut Azra (2009, hlm. 18) tantangan tersebut nampak dari kehadiran dan aktivisme gerakan transnasionalisme dalam segi-segi tertentu mencerminkan masih adanya ruang yang belum berhasil diisi Muhammadiyah dan arus utama Muslim lainnya seperti NU dan sebagainya. Di tengah berbagai dakwah dan amal usahanya, Muhammadiyah terlihat masih belum mampu merebut ruang yang potensial untuk menjadi lokusnya. Bahkan, sebaliknya terdapat gejala terseretnya warga Muhammadiyah ke dalam orientasi pemikiran dan gerakan transnasional baik yang non-politis maupun politis. Tentu saja sangat sulit mengukur seberapa besar gejala tersebut. Yang pasti, jika tidak diantisipasi para pimpinan Muhammadiyah, bukan tidak mungkin kian banyak warganya yang terseret ke dalam pemikiran dan gerakan transnasional Islam.

Dalam analisis Azra (2009, hlm. 19) dari perspektif lain, pemikiran dan gerakan Islam transnasional juga menunjukkan, Muhammadiyah dan kaum arus utama lainnya agaknya terlambat mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi di kalangan umat, khususnya dalam kaitan dengan Islam internasional. Keterlambatan itu boleh jadi karena Muhammadiyah lebih banyak terfokus pada

kegiatan-kegiatan rutin, atau bahkan juga pada isu-isu politik domestik, sehingga tidak atau kurang ‘mawas’ terhadap penetrasi pemikiran dan gerakan transnasional ke dalam Muhammadiyah.

Pada kondisi seperti itu, peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting, karena lembaga pendidikan merupakan wadah yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan semata, akan tetapi juga sebagai tempat sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi dari nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme. Dalam arti lain, lembaga pendidikan, khususnya sekolah, harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang arti dan makna nasionalisme. Pemahaman tentang apakah itu nasionalisme kewarganegaraan, apakah itu nasionalisme kebudayaan, apakah itu nasionalisme etnik, apakah nasionalisme ekonomi, atau apakah itu nasionalisme keagamaan.

Pendidikan merupakan sarana paling tepat untuk membentuk karakter generasi suatu bangsa. Pendidikan dapat dijadikan alat untuk mentransformasi ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai seperti nilai nasionalisme. Pendidikan sejarah sebagai proses pendidikan yang menekankan pada pendidikan nilai-nilai, mempunyai peran strategis dalam penanaman dan pengembangan nilai-nilai nasionalisme. Sejarah sebagai fungsi edukasi di Indonesia, dikembangkan dalam beragam bentuk dan kekhasan.

Pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi massa keagamaan seringkali ditandai oleh pengembangan nilai-nilai historis-religi. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) merupakan beberapa organisasi massa Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan corak keagamaan (religius) dengan corak umum. Hal yang menonjol sekolah-sekolah yang dibangun berbentuk MI, MTs, dan MA untuk lingkungan Kementerian Agama dan bentuk SD, SMP, serta SMA untuk lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada prinsipnya sekolah Islam terpadu, menurut Arifin (2012, hlm, 30-31) merupakan perubahan atas kegagalan yang dilakukan sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam, untuk memadukan ilmu umum dan agama. Dalam praktiknya sekolah Islam terpadu melakukan pengembangan kurikulum dengan cara memadukan kurikulum pendidikan umum dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), seperti pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain-lain, serta kurikulum pendidikan agama Islam dari Kementerian Agama (Kemenag), ditambah dengan kurikulum hasil kajian Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT).

Watson (dalam Rossidy, 2009, hlm. 88) mengemukakan Model pembelajaran Pendidikan Agama terpadu, yaitu *essentialist religious education model*. Model ini berupaya membentuk kepribadian secara padu, meliputi akal, hati dan jiwa, serta mendukung upaya memadukan kurikulum atau mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum dan menjadikan mata pelajaran agama sebagai dasar bagi mata pelajaran lain dalam kurikulum, serta memadukan sesuatu yang dipelajari siswa dengan pengalamannya melalui refleksi diri yang dilakukan siswa.

Secara historis-sosiologis, dalam pandangan Muhaimin (2001, hlm. 38-46), pendidikan terpadu lahir sebagai implikasi dari proses perkembangan perubahan paradigma pengembangan pendidikan Islam sejak abad pertengahan, dimana tercipta dikotomi antara pendidikan agama yang menekankan pada pengajaran ilmu-ilmu agama dengan pendidikan umum yang menekankan pada pengajaran ilmu-ilmu non agama (pengetahuan). Pendidikan terpadu merupakan salah satu wujud implementasi paradigma yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kematangan profesional sekaligus hidup dalam nilai-nilai Islami.

Di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi massa Islam, terdapat kekhasan dan keunikan tersendiri dalam pembelajaran sejarah. Sekolah di lingkungan Muhammadiyah misalnya, pada satu sisi sekolah tersebut mengajarkan Mata Pelajaran Sejarah berdasarkan Kurikulum Umum yang dikembangkan oleh Kemendikbud, di sisi lain diajarkan pula Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyah berdasarkan Kurikulum Khusus yang dirancang oleh organisasi Muhammadiyah.

Adanya pengembangan Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyah menjadi hal menarik karena siswa tidak hanya mengetahui Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia, akan tetapi juga mengenal Sejarah Muhammadiyah secara lebih spesifik. Dalam konteks ini, pembelajaran Sejarah Muhammadiyah secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter dan jati diri siswa yang berjiwa Muhammadiyah, dan secara umum membentuk jiwa nasionalis sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan Kemuhammadiyah adalah sebuah sistem sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita-citanya, kepada kader, anggota dan simpatisan Muhammadiyah.

Dari gambaran yang bersifat historis dan kontemporer di atas, pertanyaan mendasar terkait dengan hubungan pendidikan kemuhammadiyah dengan persoalan kebangsaan adalah bagaimana pendidikan kemuhammadiyah dapat mengembangkan nilai-nilai integritas nasional di tengah perubahan zaman secara global saat ini? Dan, bagaimana peran guru sejarah dalam mengembangkan pendidikan kemuhammadiyah sehingga visi dan misi organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan nasional modern tetap terjaga dan terrealisasikan?

Berangkat dari beberapa pemikiran di atas, peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pembelajaran sejarah gerakan nasional

kemuhammadiyahahan untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, rasa nasionalisme perlu terus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa melalui pelajaran sejarah. Disamping itu nilai-nilai religi juga harus diberikan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyahahan untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan focus penelitian di atas, rumusan permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimanakah proses pembelajaran sejarah gerakan nasional Muhammadiyah dilakukan untuk menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya?”. Atas dasar permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Bagaimana kurikulum pendidikan kemuhammadiyahahan di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyahahan dalam menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana guru melakukan transmisi nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik melalui pendidikan kemuhammadiyahahan di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dalam implementasi pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyahahan dalam menggali nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan informasi tentang pembelajaran sejarah kemuhammadiyah dalam hubungannya dengan upaya menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Secara spesifik penelitian ini bertujuan antara lain untuk :

1. Menganalisis isi Kurikulum Pendidikan Kemuhammadiyah SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.
2. Mengkaji implementasi pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyah dalam menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.
3. Menganalisis proses transmisi nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik melalui pendidikan kemuhammadiyah di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.
4. Mengkaji dan menganalisis hasil-hasil yang dicapai dalam implementasi pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyah untuk menggali nilai nasionalisme peserta didik di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun secara praktis. sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi secara ilmiah mengenai upaya menggali nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik dalam pembelajaran sejarah gerakan nasional Muhammadiyah melalui pendidikan kemuhammadiyah.
 - b. Sebagai sumber data untuk penelitian ke depannya dalam memahami lebih jauh mengenai implementasi pembelajaran sejarah gerakan nasional

Muhammadiyah melalui pendidikan kemuhammadiyah dalam menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai motivasi dan bahan masukan bagi semua pihak yang membaca studi ini, untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kehidupannya. Secara khusus, pengembangan nilai-nilai nasionalisme dapat dikembangkan melalui pembelajaran sejarah nasional maupun pembelajaran sejarah organisasi massa keagamaan di sekolah, seperti Muhammadiyah lewat Pendidikan Kemuhammadiyah. Sementara, secara umum studi ini dapat membangkitkan kepedulian masyarakat untuk membangun lingkungan yang mendukung terciptanya penanaman nilai-nilai nasionalisme di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

F. Struktur Organisasi

Penelitian ini disusun berdasarkan struktur organisasi atau sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, memuat gambaran umum dari penelitian yang membahas tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan.

Bab II, dibahas tentang pemikiran, telaah kritis, kajian teoritis, analisis para ahli tentang permasalahan yang dibahas. Secara umum, dalam bab ini dibahas tentang kajian teoritis pembelajaran dan kesadaran sejarah, pengertian nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran sejarah, pengertian pendidikan kemuhammadiyah, nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan kemuhammadiyah.

Bab III, dibahas tentang metodologi penelitian yang meliputi hal berikut: subjek dan lokasi penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi data.

Bab IV, dikaji tentang Hasil Penelitian dan Pembahasannya. Bagian ini pembahasan dibagi menjadi bagian deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian yang mencakup masalah kurikulum kemuhammadiyah, implementasi, proses transmisi dan hasil pembelajaran sejarah gerakan nasional kemuhammadiyah untuk menggali nilai-nilai nasionalisme peserta didik.

Bab V, dibahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat jawaban atas permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data hasil penelitian dan sudah dibahas secara akurat. Sedangkan rekomendasi memuat tentang saran, masukan dan kritik membangun yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti pemerintah, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Sekolah, Guru, dan peserta didik. Pada bagian ini pun disampaikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.